



## **PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH (ATS) DI KOTA BANJARMASIN**

**Ahmad Baihaqi<sup>1</sup>, Muhammad Insanul Kamil<sup>2</sup>, Mahmuda<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Universitas Lambung Mangkurat

\*Email: [ahmad.baihaqi@gmail.com](mailto:ahmad.baihaqi@gmail.com)

### **Abstrak**

Penanganan dan penuntasan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kota Banjarmasin menjadi salah satu isu penting dalam kebijakan pendidikan daerah. Dengan berbagai tantangan yang dihadapi, seperti keterbatasan akses pendidikan, faktor ekonomi, dan rendahnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan, Pemerintah Kota Banjarmasin terus berupaya untuk mengatasi permasalahan ini. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi kebijakan terkini, tantangan, serta strategi yang diterapkan oleh pemerintah dalam menangani dan menuntaskan ATS di Kota Banjarmasin. Berdasarkan data terbaru, berbagai langkah dan program telah diluncurkan untuk mencegah dan mengurangi jumlah ATS, namun permasalahan ini masih memerlukan perhatian lebih lanjut dari berbagai pihak.

**Kata kunci:** Penangan, Penuntasan, Anak Tidak Sekolah (ATS)

### **Abstract**

*The handling and resolution of Out-of-School Children (OSC) in Banjarmasin City have become a significant issue in local education policy. With various challenges such as limited access to education, economic factors, and low parental awareness of the importance of education, the Banjarmasin City Government continues to address these problems. This article aims to explore the latest policies, challenges, and strategies implemented by the government in managing and resolving OSC in Banjarmasin. Based on recent data, various initiatives and programs have been launched to prevent and reduce the number of OSC. However, this issue still requires further attention from multiple stakeholders.*

**Keywords:** Handling, Resolution, Out-of-School Children (OSC)

## **PENDAHULUAN**

Pendidikan adalah hak dasar yang harus dipenuhi untuk setiap anak. Namun, data menunjukkan bahwa di Kota Banjarmasin masih terdapat sejumlah anak yang tidak dapat mengakses pendidikan formal. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin pada tahun 2023, terdapat lebih dari 5.000 anak yang tergolong sebagai ATS. Kondisi ini berpotensi menghambat perkembangan sosial dan ekonomi daerah. Artikel ini akan membahas penyebab



utama ATS di Banjarmasin, upaya yang telah dilakukan, serta rekomendasi kebijakan yang dapat diimplementasikan.

Anak Tidak Sekolah (ATS) adalah masalah yang cukup kompleks yang dihadapi oleh berbagai daerah, termasuk Kota Banjarmasin. Menurut data Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, terdapat ribuan anak yang tidak dapat mengakses pendidikan karena berbagai alasan, mulai dari masalah ekonomi, sosial, hingga kurangnya fasilitas pendidikan di beberapa daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2018, setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dasar 12 tahun, namun kenyataannya masih banyak anak di Banjarmasin yang putus sekolah atau tidak pernah mengenyam pendidikan sama sekali. Anak Tidak Sekolah (ATS) merupakan salah satu tantangan besar dalam mewujudkan visi pendidikan yang inklusif dan merata di Indonesia, termasuk di Kota Banjarmasin. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan kesenjangan akses terhadap pendidikan formal, tetapi juga menjadi indikator masalah sosial, ekonomi, dan budaya yang kompleks. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah ATS di Indonesia mencapai jutaan anak pada tahun 2022, dengan sebagian besar berada di daerah perkotaan dan pedesaan terpencil. Di Kota Banjarmasin, permasalahan ATS dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tingkat kemiskinan, rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan, serta keterbatasan infrastruktur pendidikan yang memadai (BPS, 2022).

Upaya penanganan ATS di Kota Banjarmasin telah dilakukan melalui berbagai program yang bertujuan untuk mengembalikan anak-anak ke jalur pendidikan, baik melalui pendidikan formal maupun non-formal. Pemerintah setempat, melalui Dinas Pendidikan, telah menginisiasi program seperti Pendidikan Kesetaraan, pemberian beasiswa bagi keluarga kurang mampu, dan kampanye kesadaran pendidikan. Namun, keberhasilan program ini masih menghadapi sejumlah hambatan, di antaranya adalah kurangnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan, serta stigma sosial yang melekat pada pendidikan non-formal (Rahmat, R., & Suryadi, D, 2022). Di sisi lain, partisipasi aktif masyarakat menjadi elemen kunci dalam mengatasi masalah ATS. Keterlibatan komunitas, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendukung anak-anak kembali bersekolah. Misalnya, program *Community Learning Center* (CLC) telah menunjukkan dampak positif dalam meningkatkan literasi dan keterampilan anak-anak yang sebelumnya putus sekolah (UNICEF, 2020). Namun demikian, penanganan ATS memerlukan pendekatan yang lebih holistik, mencakup kebijakan yang berbasis data, alokasi anggaran yang lebih besar, serta penguatan dukungan sosial untuk anak-anak dan keluarga mereka.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Konsep Anak Tidak Sekolah (ATS)**

Anak Tidak Sekolah (ATS) merupakan kelompok anak yang putus sekolah atau tidak memiliki akses pendidikan formal akibat berbagai faktor seperti ekonomi, sosial, budaya, atau geografi. Menurut Sudjana (2017), ATS sering



dihubungkan dengan rendahnya tingkat literasi dan keterampilan, yang berdampak pada keterbatasan kesempatan kerja di masa depan (*Sudjana, 2017*).

### **Penyebab Anak Tidak Sekolah**

Penyebab utama ATS meliputi kemiskinan, kurangnya kesadaran orang tua, dan akses pendidikan yang tidak merata (*Suryadi, 2018*). Studi lain menyebutkan bahwa budaya lokal juga memengaruhi partisipasi anak dalam pendidikan formal, seperti pernikahan dini atau tradisi tertentu yang membatasi pendidikan anak perempuan (*Haryono, 2019*).

### **Strategi Penanganan Anak Tidak Sekolah**

Penanganan ATS memerlukan pendekatan terpadu yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan lembaga non-pemerintah. Program seperti pemberian beasiswa, pendidikan inklusif, serta peningkatan akses infrastruktur pendidikan telah berhasil diterapkan di beberapa wilayah (*Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020*). Selain itu, penyuluhan kepada orang tua tentang pentingnya pendidikan juga menjadi kunci utama dalam upaya ini (*Rahmat, 2021*).

### **Konteks Penanganan ATS di Kota Banjarmasin**

Kota Banjarmasin menghadapi tantangan unik dalam mengatasi ATS, terutama terkait kondisi geografis dan budaya lokal. Upaya pemerintah daerah seperti program "Gerakan Kembali ke Sekolah" menunjukkan hasil positif dengan penurunan angka ATS sebesar 15% dalam lima tahun terakhir (*Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, 2023*). Namun, tantangan tetap ada dalam menjangkau komunitas terpencil yang sulit diakses.

## **PEMBAHASAN**

### **Kebijakan Pemerintah Kota Banjarmasin dalam Menangani ATS**

#### **1. Program Pembinaan dan Pendataan ATS**

Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin aktif melakukan pendataan dan pembinaan anak-anak yang tidak sekolah. Salah satu langkah yang diambil adalah mengerahkan tim verifikasi dan Validasi Data Anak Tidak Sekolah Kota Banjarmasin untuk mendata anak-anak yang tidak bersekolah, yang terdata melalui Aplikasi Verval DO/Dropout. Data yang dikumpulkan akan menjadi dasar dalam penentuan kebijakan lebih lanjut, baik berupa penempatan anak di sekolah terdekat atau pemberian dukungan untuk anak yang membutuhkan.

#### **2. Pemberian Bantuan Pendidikan bagi Anak ATS**

Pemerintah Kota Banjarmasin juga memberikan bantuan berupa beasiswa dan subsidi untuk anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu, dengan harapan mereka dapat melanjutkan pendidikan. Beasiswa ini diberikan untuk tingkat dasar dan menengah, dengan tujuan untuk mencegah anak-anak dari keluarga miskin terputus dari pendidikan. Mereka

dapat melanjutkan ke Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Banjarmasin milik Pemerintah Kota Banjarmasin dan Pendidikan Non Formal melalui PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) Yayasan Pendidikan Swasta yang ada di Kota Banjarmasin.

### **3. Kolaborasi dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Sosial**

Pemerintah Kota Banjarmasin juga bekerja sama dengan berbagai LSM dan organisasi sosial untuk menangani masalah ATS. Program-program sosial ini mencakup kegiatan pendidikan non-formal, seperti kursus keaksaraan, pelatihan keterampilan, dan pendidikan berbasis komunitas yang dapat membantu anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak meskipun tidak dapat mengakses sekolah formal.

## **Tantangan dalam Penanganan ATS di Kota Banjarmasin**

### **1. Faktor Ekonomi dan Sosial**

Salah satu tantangan terbesar dalam menangani ATS adalah faktor ekonomi. Banyak keluarga yang tidak mampu membiayai pendidikan anak-anak mereka, terutama di daerah-daerah miskin. Anak-anak terpaksa bekerja untuk membantu ekonomi keluarga, sehingga mereka terhambat untuk bersekolah.

### **2. Kurangnya Kesadaran Orang Tua tentang Pentingnya Pendidikan**

Beberapa orang tua di Banjarmasin masih belum sepenuhnya menyadari pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka. Beberapa di antaranya menganggap pendidikan sebagai beban, sementara yang lain lebih mengutamakan pekerjaan anak untuk mendukung ekonomi keluarga.

### **3. Fasilitas Pendidikan yang Terbatas**

Meski kebijakan zonasi sudah diberlakukan, namun masih ada beberapa daerah di Banjarmasin, terutama di bantaran sungai dan daerah terpencil, yang kekurangan fasilitas pendidikan yang memadai. Sekolah-sekolah di daerah ini sering kali kekurangan tenaga pengajar, fasilitas, dan sarana prasarana yang memadai untuk menampung semua anak.

## **Strategi untuk Menuntaskan ATS**

### **1. Peningkatan Infrastruktur Pendidikan**

Salah satu strategi utama dalam menuntaskan ATS adalah peningkatan infrastruktur pendidikan. Pemerintah Kota Banjarmasin perlu memastikan bahwa semua anak, terutama yang tinggal di daerah terpencil, memiliki akses ke sekolah yang layak. Pembangunan sekolah baru dan peningkatan kualitas sekolah yang ada menjadi hal yang sangat penting.

### **2. Pendidikan Inklusif dan Aksesibilitas**

Pendidikan inklusif perlu diperkuat dengan memastikan bahwa semua anak, termasuk anak-anak dengan kebutuhan khusus atau anak-anak yang terisolasi karena berbagai alasan, dapat mengakses pendidikan. Hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan fasilitas khusus di sekolah-sekolah yang ada.



### **3. Pemberdayaan Orang Tua dan Komunitas**

Pemberdayaan orang tua dan masyarakat untuk mendukung pendidikan anak juga sangat penting. Pemerintah Kota Banjarmasin dapat bekerja sama dengan berbagai organisasi dan lembaga untuk meningkatkan kesadaran orang tua tentang pentingnya pendidikan dan memberikan dukungan yang diperlukan bagi mereka yang kesulitan membiayai pendidikan anak-anak.

### **4. Program Pendidikan Non-Formal**

Selain pendidikan formal, program pendidikan non-formal juga perlu diperkuat, terutama bagi anak-anak yang terlanjur putus sekolah atau anak-anak yang kesulitan mengikuti pendidikan formal. Kursus keterampilan, pelatihan, dan pendidikan berbasis komunitas dapat memberikan alternatif pendidikan yang berguna bagi mereka.

## **KESIMPULAN**

Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kota Banjarmasin memerlukan pendekatan yang terpadu dan berkelanjutan untuk menghadapi tantangan seperti akses pendidikan yang terbatas, kendala ekonomi, dan rendahnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan. Pemerintah Kota Banjarmasin telah mengambil berbagai langkah strategis melalui program-program seperti pemberian beasiswa, peningkatan akses pendidikan inklusif, dan kampanye kesadaran masyarakat. Pendekatan yang komprehensif dan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait. Kebijakan yang telah diterapkan, seperti pendataan ATS, kebijakan zonasi, dan bantuan pendidikan, sudah menunjukkan hasil yang positif, namun tantangan yang ada, terutama terkait dengan faktor ekonomi dan kesadaran masyarakat, masih perlu diatasi. Dengan berbagai upaya yang terus dilakukan, diharapkan jumlah anak yang tidak sekolah di Banjarmasin dapat terus berkurang dan akses pendidikan bagi semua anak dapat terjamin.

Meskipun sejumlah kemajuan telah dicapai, seperti penurunan angka ATS secara bertahap, upaya ini masih menghadapi kendala, terutama dalam menjangkau komunitas terpencil dan memastikan keberlanjutan program. Oleh karena itu, kerja sama yang erat antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya sangat diperlukan untuk memastikan setiap anak di Banjarmasin dapat mengakses pendidikan yang layak dan berkualitas. Dengan komitmen bersama, permasalahan ATS di Banjarmasin dapat diatasi secara menyeluruh, mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan dalam bidang pendidikan.

## **REFERENSI**

- Artikel tentang penuntasan ATS di Banjarmasin, Kalimantan Post, 2024.  
Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banjarmasin. (2023). *Statistik Pendidikan Kota Banjarmasin*.  
Badan Pusat Statistik. (2022). *Statistik Pendidikan Indonesia 2022*. Jakarta: BPS.



- Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, 2024. Data Anak Tidak Sekolah di Banjarmasin.
- Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin. (2023). *Laporan Tahunan Pendidikan Kota Banjarmasin*. Banjarmasin: Dinas Pendidikan.
- Haryono, A. (2019). *Budaya Lokal dan Pendidikan: Studi Kasus di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). *Strategi Pendidikan Nasional untuk Mengatasi Anak Tidak Sekolah*. Jakarta: Kemendikbud.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2021). *Peta Jalan Pendidikan Nasional 2020–2035*. Jakarta: Kemendikbud.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). *Peta Jalan Pendidikan Nasional 2020-2035*.
- Pemerintah Kota Banjarmasin, 2023. Kebijakan Zonasi Pendidikan di Banjarmasin.
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
- Rahmat, M. (2021). "Peran Orang Tua dalam Pendidikan Anak." *Jurnal Pendidikan Nasional*, 15(3), 112-123.
- Rahmat, R., & Suryadi, D. (2022). *Strategi Penanganan Anak Tidak Sekolah di Daerah Perkotaan*. Bandung: Penerbit Maju.
- Sudjana, D. (2017). *Pendidikan Nonformal untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Suryadi, I. (2018). "Faktor Sosial-Ekonomi Penyebab Anak Tidak Sekolah." *Jurnal Sosial*, 20(2), 45-60.
- UNICEF Indonesia. (2020). *Out-of-School Children Study: Indonesia*. Jakarta: UNICEF.
- UNICEF Indonesia. (2021). *Anak Tidak Sekolah: Tantangan dan Solusi*. Jakarta: UNICEF.
- Wawancara dengan Kepala Seksi Pendidikan Nonformal, Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, Desember 2023.